



**POLITIK HUMANITARIANISME:
KETIADAAN INTERVENSI KEMANUSIAAN
DALAM PERANG SAUDARA SRI LANKA 2001-2009**

Adinda Kinanti Prameswari

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The ethnic discrimination done by Sri Lankan government had made the outbreak of ethnic conflict in Sri Lanka for more than 26 years between government of Sri Lanka against LTTE rebels. Although many crimes such as crime against humanity and war crimes occurred, there were no action taken by international community to intervene the situation. This research aimed to analyse the absence of humanitarian intervention in Sri Lanka to end conflict. Realism theory of International Relations is used to be research framework, the research argues that the absence of humanitarian intervention happened due to there're no national interest taken by foreign states to enter Sri Lanka. Using secondary data collection method through study library. Geopolitically, Sri Lanka is a disaster prone land and also not strategic country. Economically, Sri Lanka doesn't have valuable natural resources such as gas and oil which are looked by the West.

Keywords: *Sri Lanka's Civil War, national interest, geopolitics, geo-economy, humanitarian intervention*

PENDAHULUAN

Pertentangan antara kedua etnis memicu diskriminasi oleh etnis Sinhala terhadap etnis Tamil. Diskriminasi yang paling mencolok adalah bahasa dan agama. Bahasa Sinhala ditetapkan sebagai bahasa nasional, sedangkan agama Buddha ditetapkan sebagai agama negara. Lalu, adanya diskriminasi bidang pendidikan, dimana siswa yang berbicara bahasa Tamil harus mencetak nilai jauh lebih tinggi dari mahasiswa beretnis Sinhala untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Faktor-faktor lain yang juga memicu konflik kedua bangsa, termasuk pekerjaan dan pembagian lahan (Tamil Guardian, 2008).

Berbagai upaya perundingan damai dan gencatan senjata telah dicapai diselingi dengan konflik yang lebih luas. Presiden Kumaratunga berjanji untuk bernegosiasi dengan Macan Tamil, dan mencapai gencatan senjata pada Januari 1995. Hanya tiga bulan kemudian gencatan senjata berakhir ketika Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) menenggelamkan kapal angkatan laut Sri Lanka dan menembak jatuh dua pesawat. Pada tahun 2008 dimulainya serangan militer yang ditujukan untuk mencapai kemenangan penuh atas LTTE. Kemenangan dinyatakan pada Mei 2009 setelah yang terakhir dari daerah LTTE yang telah dikendalikan (Peace Direct, 2013). Selama lebih dari seperempat abad, pemerintah Sri Lanka bertrok dengan LTTE atau Macan Tamil, yang berjuang mewujudkan sebuah negara merdeka. Perang

berakhir pada tanggal 19 Mei 2009, menyusul serangan besar pemerintah yang memaksa pemberontak untuk menyerah.

Pada tahun 2009, PBB membentuk "Crisis Operations Grup" di Sri Lanka untuk menghitung jumlah korban sipil dan memperkirakan 337.721 tewas dan 18.479 terluka. Banyaknya korban tewas juga diperparah oleh warga sipil yang terluka di zona tempur tidak memiliki akses cepat ke fasilitas medis yang berkualitas tinggi. Sejumlah sumber yang kredibel telah memperkirakan bahwa sudah ada sebanyak 40.000 kematian warga sipil (Colombo Telegraph, 2014).

Selama dan setelah konflik, ada banyak pelecehan seksual, terutama oleh pasukan keamanan Sri Lanka. Sejak 2009, masyarakat internasional telah menyerukan penyelidikan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (ICRtoP, n.a). Meskipun sudah terbukti bahwa selama perang konflik di Sri Lanka yang terjadi selama 26 tahun termasuk dalam kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang sama sekali tidak ada negara yang meng-intervensi Sri Lanka. Bantuan yang ditujukan kepada Sri Lanka sepanjang konflik dilakukan oleh negara tetangga Sri Lanka, yaitu India pada tahun 1987. Bantuan yang dilakukan India pun bukan intervensi berdasarkan kemanusiaan namun sebagai kedekatan faktor geografis dan hubungan bilateral India dengan Sri Lanka (Jayawardhana, 1987).

Keterlibatan negara lain juga ditunjukkan oleh Norwegia. Pada tahun 2002, Norwegia berperan sebagai mediator kesepakatan gencatan senjata antara LTTE dan pemerintah Sri Lanka. Sejak akhir Perang Dingin, Norwegia telah menunjukkan aktivisme politik luar negeri dalam mewujudkan perdamaian di Sri Lanka. Upaya Norwegia untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah Sri Lanka dan Macan Tamil berlangsung selama 12 tahun. Selain sebagai fasilitator perdamaian, Norwegia juga berperan sebagai monitor gencatan senjata dan donor bantuan di Sri Lanka (Bajoria, 2009).

Bantuan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan untuk penyelesaian konflik etnis yang terjadi di Sri Lanka meskipun pada tahun 2001 telah lahir norma Responsibility To Protect (R2P). Norma ini terinspirasi oleh pasal 24 dari Piagam PBB yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi rakyatnya dari kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida. Jika negara tidak mampu melindungi rakyatnya dari salah satu kejahatan tersebut, maka negara tersebut harus menerima ketika dunia internasional melakukan intervensi masalah yang terjadi negaranya (The Responsibility to Protect, 2001).

Untuk itu, permasalahan penelitian ini adalah mengapa tidak ada intervensi kemanusiaan selama perang saudara Sri Lanka 2001-2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan tidak adanya intervensi kemanusiaan selama perang saudara di Sri Lanka yang membuat konflik ini terus berlangsung selama 26 tahun dan untuk mengetahui sejauh mana respon internasional yang sudah membantu perang saudara selama konflik.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan pemikiran realisme. Menurut penganut paham realisme, manusia menyadari bahwa mereka selalu mengakui adanya konflik yang timbul di kehidupan mereka. Pemikir realisme mempercayai bahwa konflik dalam dunia internasional tidak akan pernah bisa dihilangkan, mereka tidak mempercayai akan adanya perdamaian, konflik hanya bisa diminimalisir dengan cara penyetaraan kekuatan antara negara-negara dunia (Jackson & Sorensen, 1999). Asumsi realisme menyatakan bahwa dalam dunia anarki negara-negara selalu mencari dan menyeimbangkan kekuatan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keamanan mereka (Devetak, 2008). Menurut Hans Morgenthau (1967) campur tangan negara yang diintervensi harus tetap mengikuti peraturan yang ada di dalam negara itu jadi bukan semata-mata negara pengintervensi hanya memenuhi kepentingan nasionalnya dalam mengintervensi negara tersebut. Namun di sini pemerintah negara yang diintervensi biasanya akan didesak untuk memenuhi kepentingan nasional pengintervensi.

Menurut David N. Gibbs (2000) bahwa intervensi kemanusiaan ini tidak selamanya dimaksudkan membantu negara yang sedang berkonflik, contohnya adalah negara Timor Leste sumber daya kaya akan minyak dan tambangnya sangat berlimpah, negara yang mengintervensi adalah Australia bernegosiasi untuk mendapatkan hal yang menonjol di negara konflik dengan alasan untuk meredakan konflik yang terjadi antara perang suku yang terjadi disana. Untuk memperkuat alasan ia membantu Timor Leste menambahkan alasan geografis atau sebagai negara tetangga. Selalu ada maksud tertentu di dalam intervensi tersebut. Menurut Daniel Fiott (2013) pemahaman realisme menyatakan bahwa kepentingan nasional akan selalu bertolak belakang, dorongan moral untuk membantu mereka misal adanya pelanggaran hak asasi manusia berat di negaranya. Dari pemikiran realisme diatas dijelaskan bahwa pemikiran realisme memikirkan keuntungan dan kerugian di dalam tindakan melaukan intervensi kemanusiaan.

PEMBAHASAN

Sejarah Perang Saudara di Sri Lanka 2001-2009

Pada ke-13 etnis Tamil dari India bermigrasi ke Sri Lanka sehingga membentuk populasi kecil yang sebagian besar beragama Hindu. Di sisi lainnya adanya emigrasi dari masyarakat Indo – Arya membentuk populasi etnis Sinhala yang menjadi etnis mayoritas di Sri Lanka. Keberadaan kedua etnis tersebut memicu ketegangan ketika Inggris keluar dari Sri Lanka, pada tahun 1796 Inggris menganeksasi wilayah Colombo dan Jaffna ketika Belanda sudah meninggalkan Sri Lanka. Pada awal abad ke 19 Inggris menciptakan perkebunan besar untuk menanam kopi. Ekspor kopi di Ceylon berkembang pesat sehingga sejumlah besar pekerja India dibawa untuk berkerja di perkebunan. Selain kopi karet dan kelapa juga menjadi tanaman unggulan juga di Sri Lanka. Pada tahun 1910 Sri Lanka diizinkan untuk memilih salah satu anggota dewan legislatif, namun pada saat itu Sri Lanka tidak puas dan pada akhirnya pada tahun 1931 Sri Lanka diberikan konstitusi baru. Sejak saat anggota legislatif terpilih melalui pemilihan umum. Sri Lanka kemudian menuntut kemerdekaan penuh, dan Inggris memberikannya pada tahun 1947 dan Sri Lanka merdeka pada 4 Februari 1948, Ketika Inggris sudah meninggalkan Sri Lanka dan mulailah kedua etnis tersebut memperebutkan kekuasaan (Lambert, n.a).

Terjadinya ketidakstabilan politik di Sri Lanka dikarenakan sudah terbebasnya dari masa penjajahan yang membuat banyak kalangan ingin menjadi pemimpin. Dari zaman penjajahan etnis Sinhala banyak menempati posisi di pemerintahan yang ditempatkan oleh para penjajah yang berkuasa, sehingga hal tersebut membuat etnis Sinhala merasa diunggulkan dibandingkan Tamil. Hal itu pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Sebagai contohnya peresmian bahasa Sinhala sebagai bahasa nasional yang diakui di Sri Lanka. Keputusan tersebut menimbulkan persaingan antara etnis Sinhala yang merasa sebagai mayoritas dan etnis Tamil yang merasa sebagai suku minoritas yang suaranya sama sekali tidak dipertimbangkan (Bajoria, 2009).

Pada tahun 1956 terjadi eskalasi konflik antara etnis Tamil dan etnis Sinhala. Solomon Bandaranaike sebagai perdana menteri saat itu menyatakan bahwa Sinhala merupakan bahasa resmi yang akan digunakan di negara Sri lanka. Etnis Tamil minoritas tidak terima dikarenakan adanya dominasi Sinhala di dalam pemerintahan ditambah penepatan agama Buddha sebagai agama resmi. Bandaranaike kemudian dibunuh dan istrinya menggantikan sebagai perdana menteri pada tahun 1960. Ketegangan semakin memuncak pada tahun 1983 dimana etnis tamil menyerang pemerintah, hal tersebut tidak bisa lagi dibendung yang akhirnya pecah menjadi perang saudara (Palamkunnel, 2003). Konflik tidak dimulai pada tahun 1956 dikarenakan etnis Tamil melakukan aksi protes dan rasa tidak terimanya kepada pemerintah, namun hal tersebut tetap dihiraukan. Kelompok bersenjata pemberontak itu dibentuk pada tahun 1976 yang bertujuan untuk mendapatkan hak-hak yang setara sebagai

warga negara Sri Lanka. Timbulnya LTTE merupakan munculnya persengitan antara pemerintah Sri Lanka dengan LTTE (ICRtoP, n.a).

Kejahatan Perang & Kemanusiaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Sri Lanka

Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan pemerintah Sri Lanka adalah penembakan secara sengaja yang dilakukan di rumah sakit. Pasukan keamanan pemerintah menembaki rumah sakit dan pusat kesehatan darurat yang banyak dipenuhi oleh para pengungsi. Selama insiden yang terjadi pada 12 Mei tahun 2009, staf medis, PBB, ICRC dan lain-lain melaporkan bahwa penembakan ini menewaskan 49 orang. Pasukan pemerintah terus menyerang fasilitas medis hingga memaksa warga sipil untuk meninggalkan tempat yang sudah diserang (Mushtaq, 2012). Kejahatan pemerintah Sri Lanka juga dilakukan kepada pekerja kemanusiaan pada saat operasi kemanusiaan. Pasukan keamanan berulang kali melakukan penembakan dan bom udara pada tanggal 11 Mei di utara Sri Lanka yaitu kota Mullaitivu dimana konflik itu terjadi pada tahun 2009, yang dipenuhi dengan para pekerja dan warga sipil. Banyak warga sipil yang terbunuh sekitar 378 orang dan terluka yang mencoba untuk memberikan atau menerima bantuan kemanusiaan, termasuk perempuan, anak-anak dan bayi (Mushtaq, 2012).

Kejahatan Perang & Kemanusiaan yang Dilakukan oleh LTTE

LTTE melakukan kejahatan perang karena menembaki warga sipil. LTTE menembaki dan membunuh atau melukai banyak warga sipil yang berusaha melarikan diri dan menyeberang ke wilayah yang dikuasai pemerintah. Pada tanggal 12 Februari 2009 hampir 70.000 orang mengungsi karena udara pemboman terus-menerus dari pasukan pemerintah di Mullaitivu dan Kilinochchi. Hal tersebut membuat masyarakat utara Sri Lanka tidak merasa aman sehingga beribu-beribu orang memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih aman (Khare & Nigam, 2015). LTTE juga melakukan perekrutan tentara anak. Hanya saja, perekrutan ini bisa dihindari jika orang tua dari anak yang ingin direkrut tersebut memberikan uang kepada anggota LTTE sebesar yang sudah ditentukan. Ini berarti anak dari kalangan tidak mampu pasti akan direkrut oleh LTTE (Coalition To Stop The Use Of Child Soldiers, 2009).

Peran Operasi Kemanusiaan Tokyo Co-chair

Adanya beberapa bantuan yang diberikan kepada Sri Lanka seperti operasi kemanusiaan yang dinamakan Tokyo Co-Chair ini diadakan di Tokyo. Tokyo Co-Chairs yang beranggotakan Uni Eropa, Amerika Serikat, Norwegia, dan Jepang. Organisasi itu melakukan konferensi donor darah untuk Sri Lanka yang diadakan pada tahun 2003 di Tokyo, tujuannya sebagai wujud optimisme dan rasa prihatin dari empat negara tersebut. Mereka menyatakan optimisme kepada pemerintah Sri Lanka karena sudah mengakhiri gencatan senjata tahun 2002. Mereka menegaskan bahwa konflik sipil antara etnis Tamil dan etnis Sinhala tidak bisa dilakukan dengan cara militer dan politik (Vaughn, 2008). Co-chairs telah memberikan bantuan tunai termasuk dana untuk tsunami lebih dari US \$3.400 juta berdasarkan perjanjian Tokyo. Lebih dari 20% dari bantuan tersebut dialokasikan ke Sri Lanka bagian utara dan timur yang termasuk daerah yang dikuasai LTTE. Bantuan tersebut telah memberikan pertolongan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang di Sri Lanka. Selama perjanjian gencatan senjata oleh kedua belah pihak, komunitas internasional tetap memberikan bantuannya selain bantuan kemanusiaan, diantaranya peningkatan kesehatan, pendidikan dan pengembangan (Regjeringen Stoltenberg II, 2006).

Upaya Damai yang Dilakukan oleh Komunitas Internasional

Indian Peacekeeping Force (IPKF) dibentuk sebagai bagian dari isi piagam tersebut. IPKF dikirim ke zona konflik yaitu di utara Sri Lanka untuk mengakhiri permusuhan dan mengawasi penyerahan senjata oleh militan Tamil. Sementara itu, diplomat dari India dan Sri Lanka berusaha menegosiasikan agar gencatan senjata dapat diperpanjang oleh kedua etnis Sinhala dan etnis Tamil. Namun kehadiran IPKF tersebut justru menimbulkan konflik antara pasukan penjaga perdamaian dan pemberontak. Pada 1998 saat berlangsung pemilu di bawah kekuasaan Ranasinghe Premadasa, pemerintah Sri Lanka menentang kehadiran IPKF, karena dicurigai memberikan bantuan kepada LTTE. IPKF akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1990 setelah mengalami banyak kerugian dan tidak berhasil dalam membantu meredakan konflik beberapa alasannya seperti tidak memiliki kecerdasan, memiliki sedikit kebebasan bertindak untuk merencanakan dan melaksanakan operasi, dan sedikitnya logistik yang digunakan, bahkan helikopter bersenjata tidak datang tepat waktu (Lunn & Taylor, 2009).

India memandang IPKF sebagai bentuk simpatinya terhadap Sri Lanka. India menurunkan 2000 tentaranya ditambah melakukan latihan militer walaupun tidak mempersiapkan tentaranya secara matang, namun karena India merasa bertanggung jawab sebagai negara tetangga Sri Lanka yang paling dekat, maka ia merasa harus melakukan mediasi terhadap konflik etnis yang terjadi di Sri Lanka. Dana yang didapatkan oleh pemerintah India untuk membiayai IPKF dihasilkan dari uang penarikan pajak di negaranya (Waduge, 2013).

Norwegia memainkan peran utama dalam menengahi perjanjian gencatan senjata pada tahun 2002. Norwegia adalah negara netral sehingga dapat diterima oleh kedua pihak. Jon Hanssen-Bauer selaku diplomat dari Norwegia mengatakan bahwa LTTE terdaftar sebagai kelompok teroris di Uni Eropa. Namun bagi Norwegia LTTE bukan semata-mata kelompok teroris namun pemberontak yang menginginkan keadilan dari pemerintah sehingga Norwegia berusaha agar konflik tersebut tidak meluas dan semakin memperkeruh keadaan (Bauer, 2006).

Pada tahun 2002 Norwegia berhasil memfasilitasi gencatan senjata antara etnis Sinhala dan etnis Tamil. Situasi tersebut bertahan selama dua tahun hingga tahun 2004 ketika bencana tsunami terjadi. Norwegia berhasil melakukan negosiasi hingga gencatan senjata pun tercapai ditambah dengan komitmen untuk memberikan bantuan kepada korban tsunami. Kedua etnis akhirnya sepakat untuk membantu para korban (Bauer, 2006)

Menteri Luar Negeri Norwegia Jonas Gahr Støre mengatakan bahwa sejauh ini hingga tahun 2008 sudah 250.000 warga yang meninggalkan rumah dan bergantung pada perawatan medis. Jonas Gahr menyatakan bahwa Norwegia harus membantu para korban untuk kembali ke rumahnya. Norwegia terus memberikan bantuan makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan para korban karena merasa bertanggung jawab sebagai mediator. Namun komitmen itu hanya sementara dikarenakan etnis Tamil kembali memberontak agar hak-haknya terpenuhi sementara pemerintah Sri Lanka tetap tak ingin membagi kekuasaannya (International Crisis Group, 2008).

Faktor Geografi Politik

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dari segi geografis diantaranya faktor bencana alam dan iklim di Sri Lanka. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, badai, kekeringan, erosi pantai, tsunami, gelombang laut, dan kenaikan permukaan air laut adalah bencana alam utama yang telah menyebabkan hilangnya nyawa, dan kerusakan besar yang berdampak kepada kerugian negara.

Bahaya longsor mengakibatkan dampak kepada masyarakat dan tentunya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang terganggu biasanya transportasi darat yaitu kereta api terutama yang berposisi di pegunungan. The National Building Research Organization (NBRO) telah melakukan penelitian tanah longsor yang terjadi di Sri Lanka, yang ada

beberapa kabupaten yang mengalami longsor paling parah. Beberapa kabupaten di dataran tinggi yang beresiko tertinggi yaitu di Kabupaten Kegalle diikuti oleh Ratnapura dan kabupaten Nuwara Eliya. Kalutara, Kandy, Badulla, Matale dan Kurunegala kabupaten memiliki sedikit risiko. Berikut grafik yang menunjukkan meningkatnya bencana tanah longsor di Sri Lanka (Bandara, 2000). Selanjutnya bencana banjir, banjir yang terjadi pada tahun 1990, 1992 dan 2003 adalah kejadian bencana alam yang sering dihadapi oleh Sri Lanka daripada bencana alam lainnya. Ada 103 daerah aliran sungai dimana sekitar 10 sungai dianggap sebagai yang utama. Di antaranya sungai besar Kelani, Gin, Kalu, Nilwala dan Mahaweli rentan terhadap banjir. Peningkatan populasi dan kebutuhan selanjutnya faktor tanah telah memaksa lebih banyak orang untuk tinggal dan bekerja di daerah-daerah rawan banjir, sehingga banjir tidak bisa dibendung lagi karena daerah resapannya di bangun rumah atau penggunaan yang tidak tepat, penggundulan hutan (Hemachandra, 2010).

Banjir besar berkaitan dengan dua musim hujan. Hujan deras di lereng Timur dan Selatan-Barat merupakan penyebab utama dari risiko banjir. Lereng Barat menerima curah hujan di kedua Maha (September-Januari) dan Yala (Mei-Agustus). Lereng Timur sebagian besar curah hujan selama musim Maha (September-Januari). Bencana ini juga termasuk siklon dan badai musim yang dapat membawa hujan lebat dalam periode waktu yang singkat. Jadi dua daerah menunjukkan berbeda musiman banjir (Hemachandra, 2010). Adapun bencana lainnya yang sering terjadi di Sri Lanka yaitu kekeringan. Banyak faktor-faktor yang menimbulkan kekeringan itu terjadi yaitu curah hujan sedikit, penggunaan lahan yang tidak tepat, dan budidaya setiap negara yang tidak menyiapkan dampak dari kekeringan itu sendiri. Kekeringan besar terjadi selama periode 1953-1956, 1974-1977, 1981-1983 dan 1995-1996. Kekeringan itu menyebabkan kerusakan besar terhadap perekonomian dan mengganggu upaya pengembangan Sri Lanka. Pada periode 2001-2002, 1,6 juta orang yang tinggal di daerah zona kering selatan dan utara barat mengalami kekeringan parah (Srilanka Disaster Knowledge, n.a).

Faktor Kekayaan Alam

Kekayaan alam yang dimiliki Sri Lanka yang utama adalah penghasil grafit terbesar kedua di dunia, yang pertama ialah China. Kualitas grafit di Sri Lanka sangat bagus. Sumber daya alam lain yaitu biji besi dan batu mulia yang banyak ditemui di wilayah bagian tengah Sri Lanka. Selain itu, daerah ini juga memiliki sumber daya berupa kaolin yaitu bahan pembuat porselen, bahan pembuat genteng, ubin, barang pecah belah dan batu bata, pasir kuarsa dan batu gamping atau kapur. Berikut grafik produksi grafit di Sri Lanka.

Dalam hal tanaman padi, kacang-kacangan biji-bijian, biji minyak dan bumbu dan buah-buahan dan sayuran adalah komoditi utama juga yang dapat dihasilkan. Padi ini adalah yang paling penting di dalam sektor pertanian dalam negeri. Pada 2001 padi berkontribusi 2,3% terhadap PDB dan menyumbang hampir 15% dari sektor pertanian terhadap PDB (UNCCD, 2002).

Ada beberapa sumber energi yang diunggulkan di Sri Lanka seperti hidro listrik, minyak bumi dan biomassa. Pada tahun 1996, hidro listrik menyumbang 780.000 ton setara dengan 11,4%, minyak mentah sebesar 2.169.000 setara dengan 31,5% dan biomassa untuk 3.930.000 setara dengan 57,1%. Produk minyak bumi disediakan melalui produksi lokal atau impor langsung dari produk olahan. Penggunaan utama produk minyak bumi adalah sektor transportasi 59%, sektor industri 22%, sektor listrik 15% dan keperluan rumah tangga dan lainnya 4% (UNEP, n.a).

Permintaan untuk biomassa adalah sumber energi yang paling banyak digunakan di Sri Lanka untuk kebutuhan domestik, komersial dan sektor industri. Sektor domestik terutama tergantung pada bahan bakar kayu, residu kelapa, sekam padi dan serbuk gergaji, sementara

manufaktur industri seperti roti dan ubin dan pembuatan batu bata dan sektor komersial tergantung pada kayu bakar (UNEP, n.a).

Sri Lanka adalah negara yang tidak menghasilkan minyak atau gas. Sebagian besar dari kebutuhan tersebut di impor dari Arab Saudi. Setiap tahunnya Sri Lanka mengimpor 2 million metric ton minyak mentah, 4 million metric ton produk olahan minyak bumi dan 2,25 million metric ton batubara. Biaya yang dikeluarkan sebesar sekitar US \$ 5 milyar. Biaya yang dikeluarkan 25% dari pengeluaran impor dan hampir 50% dari total pendapatan ekspor. Akibatnya, permintaan energi Sri Lanka mempengaruhi anggaran nasional dan nilai tukar di negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Sri Lanka berusaha untuk tidak tergantung pada impor minyak. Departemen Tenaga dan Energi Sri Lanka telah mengembangkan rencana pengembangan sektor energi di dalam penggunaan energi sekaligus untuk mengurangi impor minyak (Rodrigo, 2015). Pemerintah Sri Lanka berencana mengembangkan energi angin dan pembangkit listrik tenaga surya. Menteri perminyakan Chandima Weerakkody mengatakan;

Reduction on oil dependence is not easy since the transport sector especially the public transport sector is 100% dependent on imported oil. Public and private buses as well as locomotives in Sri Lanka are purely dependent on imported oil. In order to eliminate this dependence Sri Lanka must introduce electric operated or hybrid vehicles, However, this can only be done with sector specific initiatives, eliminating the discussed drawbacks. For example, Sri Lanka may need to focus on exploring new opportunities such as energy production from ocean current in order to pave the way to energy independence (Ondaatjie, 2015).

PENUTUP

Intervensi kemanusiaan merupakan suatu kajian yang penting dalam Hubungan Internasional. Pemikiran realisme berasumsi bahwa kepentingan nasional mendorong tindakan negara. Intervensi kemanusiaan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat hak asasi manusia tidak mendapatkan perlindungan di wilayahnya sendiri. Namun menurut penganut realis intervensi kemanusiaan bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional.

Konflik etnis di Sri Lanka selama 26 tahun merupakan studi kasus menarik untuk menguji asumsi realis. Tidak adanya intervensi kemanusiaan di Sri Lanka meskipun terjadi kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan menuntun penjelasan. Kejahatan yang dilakukan oleh kedua pihak seperti melakukan penyerangan terhadap warga sipil, menyerang tempat pengungsi, rumah sakit, merekrut tentara anak secara paksa di bawah umur, melakukan pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap warga sipil.

Sesuai dengan teori realis, penelitian ini mengajukan hipotesis yaitu tidak adanya intervensi kemanusiaan di Sri Lanka dikarenakan tidak adanya kepentingan nasional bagi negara pengintervensi. Penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya intervensi kemanusiaan di Sri Lanka, karena adanya faktor faktor geografi politik dan geoekonomi. Sri Lanka adalah negara yang rawan akan bencana alam. Hal ini membuat Sri Lanka bukan tergolong negara penting untuk diintervensi. Sri Lanka juga bukan salah satu negara penghasil minyak dan gas. Padahal kedua SDA tersebut sangat penting bagi Barat. Oleh sebab itu tidak ada alasan kuat bagi negara-negara Barat untuk mengintervensi Sri Lanka.

Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan. Penelitian ini hanya menganalisis faktor-faktor yang berasal dari internal Sri Lanka sebagai dasar merumuskan argumen bahwa tidak ada keuntungan bagi negara pengintervensi melibatkan diri dalam perang saudara Sri Lanka. Sulitnya menemukan data dari pihak pengintervensi dikarenakan penelitian ini hanya mengandalkan data sekunder.

Referensi

- Akashi, Y. (2008). *Current Affairs Sri Lanka*. <http://www.priu.gov.lk/news_update/Current_Affairs/ca200801/20080115japan_aid_yasushi_akashi.htm>. Diakses 10 April 2016.
- Devetak, R. (2008). *An Introduction to International Relations: Australian Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bajoria, J. (2009). *The Sri Lankan Conflict* dari Council on Foreign Realtion. <<http://www.cfr.org/terrorist-organizations-and-networks/sri-lankan-conflict/p11407>>. Diakses 14 Mei 2015.
- Bandara, M. C. (2000). "Land Resources. Natural Resources of Sri Lanka 2000. Sri Lanka", *National Science Foundation*, Vol. 7, pp. 53-73.
- Bauer, H. (2006). *EU ban on LTTE hurt peace efforts*. <<http://www.lankanewspapers.com/news/2006/8/8208.html>>. Diakses 13 Maret 2016.
- BBC. (2015). *Sri Lanka country profile - Overview*. <<http://www.bbc.com/news/world-south-asia-11999611>>. Diakses 7 Mei 2015.
- Chomsky, N. (1994). "Humanitarian Intervention", *Chomsky Articles*, Vol. 2, pp. 30-40.
- CNN. (2009). *CNN dari Red Cross: Crisis unfolding in Sri Lanka*. <<http://edition.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/01/28/sri.lanka.fighting/#cnnSTCText>>. Diakses 7 April 2016
- Colombo Telegraph. (2014). *Sri Lanka's War In Its Last Phase: Where WIA Figures Defeat The Gross KIA Estimates*. <<https://www.colombotelegraph.com/index.php/sri-lankas-war-in-its-last-phase-where-wia-figures-defeat-the-gross-kia-estimates/>>. Diakses 14 Mei 2015.
- Crimes against humanity*. (n.a.). <<http://www.internationalcrimesdatabase.org/Crimes/CrimesAgainstHumanity>>. Diakses 3 juli 2015.
- Fiott, D. (2013). "Realist Thought and Humanitarian Intervention", *The International History*, Vol. 35, pp. 766-782.
- Gibbs, D. N. (2000). "Realpolitik and Humanitarian Intervention: The Case of Somalia", *International Politics*, Vol. 37, pp. 41-55.
- Hemachandra, D. (2010). "Status Of Disaster Management", *Final Report for The Visiting Researcher Programe, Ministry Of Disaster Management*, Juli
- Humanitarian Action. (2014). *InterAction A United voice for global change*. <<https://www.interaction.org/work/humanitarian>>. Diakses 20 Maret 2016.
- ICRC. (n.a). *Rule 156. Definition of War Crimes* dari Customary IHL. <https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter44_rule156>. Diakses 20 Maret 2015.
- ICRC. (2015). *ICRC in Sri Lanka: Evolving humanitarian action*. <<https://www.icrc.org/en/document/icrc-sri-lanka-humanitarian-action>>. Diakses 31 Maret 2016.
- ICRtoP. (2014). *United Nation*. <<http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/document-archive/united-nations>>. Diakses 9 oktober 2015.
- ICRtoP. (n.a). *Crisis in Sri Lanka* dari International Coalition for The Responsibility to Protect. <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-sri-lanka#civil_war>. Diakses 14 Mei 2015.
- IFRC. (n.a). *The International Committee of The Red Cross (ICRC)*. <<http://www.ifrc.org/en/who-we-are/the-movement/icrc/>>. Diakses 31 Maret 2016.
- IFRC. (2001). *Sri Lanka: Drought dari Emergency Appeal*. <<http://www.ifrc.org/docs/appeals/01/2501.pdf>>. Diakses 12 Mei 2016.

- ICG. (2010). *War Crimes In Sri Lanka*. <<http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/sri-lanka/191-war-crimes-in-sri-lanka.aspx>>. Diakses 11 november 2015.
- ICG. (2009). *Japan: Back UN action on Sri Lanka*. <<http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6096&l=1&m=1>>. Diakses 14 Maret 2016.
- ICG. (2008). "Sri Lanka's return toward: Limiting the damage", *Asia Report*. Vol. 22. pp. 15-23.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (1999). *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Jayawardhana, K. (1987). *Ethnic Conflict In Sri Lanka And Regional Security*. <<http://www.infolanka.com/org/srilanka/issues/kumari.html>>. Diakses 14 Mei 2015.
- Khare, s., & Nigam, m. (2015). *know nliu dari sri lanka's war crimes controversy*. <<http://knownliu.weebly.com/2357236623392368-newsletter/sri-lankas-war-crimes-controversy>>. Diakses 13 November 2015.
- Lambert, T. (n.a). *A Bried History Of Sri Lanka*. <<http://www.localhistories.org/srilanka.html>>. Diakses 9 Maret 2016.
- Lunn, J., dan Taylor, C. (2009). "War and Peace in Sri Lanka", *Research Paper 09/15*, June.
- Morgenthau, H. J. (1967). "To Intervene or not to Intervene", *Foreign Affairs*, Vol. 45, No.3, pp. 425-436.
- Mushtaq, S. (2012). "Identity Conflict in Sri Lanka: A Case of Tamil Tigers", *International Journal of Humanities and social Science*, Vol.2, No. 15, pp. 202-210.
- Nincic, M., & Nincic, D. (2004). "Humanitarian intervention and paradoxes of moral authority: lessons from the Balkans", *The International Journal of Human Rights*, Vol. 35, pp. 45-64.
- Ministry of foreign Affairs of Japan. (2009). *Ministry of foreign Affairs of Japan*. <http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2009/5/1192009_1134.html> Diakses 10 April 2016.
- Noonsite. (n.a). *Trincomalee - Profile*. <<http://www.noonsite.com/Countries/SriLanka/trincomalee>>. Diakses 29 April 2016.
- Nguyen, M. (n.a). *Causes of Ethnic: Examining the role of religious diversity and contagion effects*. <http://www.creighton.edu/fileadmin/user/CCAS/docs/Mai_Nguyen.pdf>. Diakses 2 April 2016
- OCHA. (2008). *Common Humanitarian Action Plan for Sri Lanka 2008* <<http://www.unocha.org/cap/appeals/common-humanitarian-action-plan-sri-lanka-2008>>. Diakses 2 April 2016.
- Ondaatjie, A. (2015). *Billionaire's exit prompts Sri Lanka to seek new oil explorer*. <<http://www.worldoil.com/news/2015/10/13/billionaire-s-exit-prompts-sri-lanka-to-see-new-oil-explorer>>. Diakses 16 Mei 2016.
- Palamkunnel, L. (2003). *The History of Tamil/Sinhalese Conflict*. <<http://www.postcolonialweb.org/southasia/srilanka/history/palamkunnel1.html>>. Diakses 7 November 2015.
- Peace Direct. (2013). *Insight on Conflict*. <<http://www.insightonconflict.org/conflicts/sri-lanka/conflict-profile/>>. Diakses 13 Mei 2015.
- Regjeringen Stoltenberg II. (2006). *Government.no dari The Tokyo Co-Chairs appeal to Sri Lanka to pull back from crisis*. <<https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/the-tokyo-co-chairs-appeal-to-sri-lanka/id419656/>>. Diakses 1 April 2016.
- Rodrigo, C. (2015). *The Road to Becoming an Energy Independent Country: Can We Deliver?*. <<http://www.ips.lk/talkingeconomics/2015/08/05/the-road-to-becoming-an-energy-independent-country-can-we-deliver/>>. Diakses 16 Mei 2016.

- Srilanka Disaster Knowledge Network. (n.a). <http://www.saarc-sadkn.org/countries/srilanka/hazard_profile.aspx>. Diakses 24 April 2016.
- Tamil Guardian. (2008). *Root causes of the ethnic conflict in Sri Lanka*. <<http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=1609>>. Diakses 13 Mei 2015.
- Trubowitz, P. (1998). *Defining the national interest : conflict and change in American foreign policy*. Chicago: University of Chicago Press.
- UNCCD. (2002). "National Action Programme for Combating Land Degradation in Sri Lanka", *Ministry of environment and Natural Resources*.
- UNEP. (n.a). *United Nations Environment Programme dari UNEP live*. <<http://uneplive.unep.org/country/index/LK#charts>>. Diakses 11 Mei 2016.
- Vaughn, B. (2008). *Congressional Research Service dari Sri Lanka: Background and US relations*. <<http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL31707.pdf>>. Diakses 13 Maret 2016.
- Waduge, S. (2013). *Vijayvaani. com: The complete opinions forum*. <<http://www.vijayvaani.com/ArticleDisplay.aspx?aid=2765>>. Diakses 10 April 2016.